

Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Bondowoso

Dr. Arik Susbiyani SE.,M.Si

Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
ariksusbiyaniunmuh@gmail.com

Abstract

This study aimed to examine: 1) The effect of performance audit to support public accountability on Bondowoso government 2) The effect of functional supervision to support public accountability on Bondowoso government. This type of research that is classified as causative research. The population in this study is SKPD Bondowoso. The selection of the sample with total sampling method. The data used in this study in the form of primary data. Data collection techniques with survey techniques by distributing questionnaires to each head and the entire head of the SKPD. The research proves that performance of audit and functional Supervision significant and positive impact on public accountability. In this study suggested: 1) For a functional regulatory authorities in order to continue to perform its role in overseeing the optimal and better . 2) In the next study can add variables that affect other Public Accountability such as eksternal control, and supervision of DPRD, Audit performance and Auditor independency .

Keywords: performance audit, functional supervision, public accountability

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melapor kan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Seiring dengan munculnya tuntutan dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin

dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut. Audit yang dilakukan pada sektor publik pemerintah berbeda dengan yang dilakukan pada sektor swasta. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang institusional dan hukum, dimana audit sektor publik pemerintah mempunyai prosedur dan tanggung jawab yang berbeda serta peran yang lebih luas dibanding audit sektor swasta.

Audit yang dilakukan pada sektor pemerintah tidak hanya terbatas pada audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut. Audit Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Audit Kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya, yang membedakan antara audit kinerja dengan audit lainnya adalah dalam hal laporan audit. Dalam audit keuangan, hasil audit adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan kriteria standar yang ditetapkan tanpa pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. (Deddy&Sherly, 2010).

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tuntutan tersebut memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Salah satu perubahan mendasar dalam manajemen keuangan daerah pasca reformasi keuangan daerah adalah perubahan sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal, ini unit satuan kerja merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban pemerintah daerah dan relatif lebih banyak melaksanakan tugas operasional pemerintahan dan lebih banyak mengkonsumsi sumber daya, yang tentunya harus diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan haruslah diimbangi dengan adanya pemerintahan yang baik. Dalam upaya menuju

pada pemerintahan yang baik atau *good governance* ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar yang saling berkaitan. Ketiga elemen dasar tersebut adalah partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat berperan serta atau berpartisipasi secara aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan secara transparan dan pelaksanaan pemerintahan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam bahasa akuntansi, akuntabilitas (kemampuan memberikan pertanggungjawaban) merupakan dasar dari pelaporan keuangan. Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung.

Dari hal tersebut fenomena yang dapat kita pahami bahwa masih lemahnya pengawasan pada masing-masing satuan kerja, hal ini dapat menimbulkan berbagai macam bentuk penyimpangan dari pelaksanaan anggaran. (LHP BKP-RI, 2011). Selain itu, pengawasan secara intern di masing-masing satuan kerja dilakukan oleh atasan langsung dan oleh Badan Pengawas Daerah dengan melakukan pemeriksaan reguler. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung. (LHP BKP-RI, 2010)

Audit Kinerja Sektor Publik Dan Akuntabilitas Publik

Audit sektor publik dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah mematuhi prinsip akuntansi berterima umum, peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern serta kegiatan operasi entitas sektor publik dilaksanakan secara efisien, ekonomis, dan efektif. Dalam keterbatasan yang ada, audit tetap perlu dilakukan agar tercipta akuntabilitas publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Rai (2010:31) menyatakan bahwa audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Manfaat utama audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik.

H1 : Audit kinerja sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

Pengawasan Fungsional Dan Akuntabilitas Publik

Pengawasan Fungsional merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah daerah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah daerah (Sadu Wasistiono, 2010). Pelaksanaan pengawasan fungsional diarahkan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan tujuan agar pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan itu berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Deddy Supardi dan Sherly (2010) menyatakan bahwa pengawasan fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Sehingga dengan dilaksanakannya pengawasan fungsional yang memadai akan menunjang akuntabilitas publik. Pernyataan tersebut diperkuat dengan Penelitian Cici rahayu (2011) yang menguji pengaruh audit kinerja dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas

publik pada SKPD di Pemerintah Kota Cimahi, yang menunjukkan hasil bahwa audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas publik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kota Cimahi. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan dilakukannya pengawasan oleh aparat pengawasan fungsional maka hal tersebut akan berpengaruh signifikan dalam menunjang akuntabilitas publik, dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga.

H2 : Pengawasan Fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja

2. METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di pemerintah kabupaten Bondowoso yaitu terdapat 41 SKPD. Menurut Arikunto (2002), sampel adalah sebagian atau perwakilan populasi yang diteliti dengan menggunakan cara tertentu. Penelitian ini menggunakan metode total sampling dikarenakan populasinya kurang dari 100 subjek. Responden pada penelitian ini adalah kepala SKPD dan seluruh kepala bagian SKPD di kabupaten Bondowoso yang berjumlah 82 Responden

Analisis Path

Untuk Uji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen, pengujian menggunakan analisis path dengan persamaan sebagai berikut:

$$ZY = ZX_1 + ZX_2 + e$$

Keterangan:

ZY = Akuntabilitas Publik

ZX1 = Audit kinerja sektor publik

ZX2 = Pengawasan fungsional

e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif Variabel

Variabel	Kisaran Teoritis	Kisaran Sesungguhnya	Rata-rata	Standar Deviasi
(X1)	8-40	17-32	25.57	4.374
(X2)	8-40	18-35	27.28	6.144
(Y)	8-40	15-37	29.28	4.967

Uji Kualitas Data.

Instrumen penelitian merupakan media dalam pengumpulan data, sehingga kuesioner dikatakan *reliabel* jika jawaban responden konsisten bila diajukan pertanyaan yang sama dalam waktu yang berbeda. Untuk mengetahui reliabilitas suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel penelitian, maka diperlukan uji reliabilitas data. Kualitas data yang dihasilkan dapat dilakukan melalui uji reliabilitas dan validitas (Hair et al. 1998)

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2001). Pengukuran dengan *one shot* atau pengukuran sekali saja digunakan dalam penelitian ini. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai *cronbach alpha* >0,60 (Nunally, 1969 dalam Ghozali, 2005).

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Audit Kinerja Sektor Publik (X1)	0,890
Pengawasan Fungsional (X2)	0,912
Akuntabilitas publik (Y)	0,915

Dari tabel 4.4 diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* instrumen variabel audit kinerja sektor publik sebesar 0,890 dan instrumen variabel pengawasan fungsional 0,912 akuntabilitas publik 0,915. Hal ini artinya instrumen variabel audit kinerja sektor publik, pengawasan fungsional, dan akuntabilitas publik adalah handal atau *reliabel* untuk digunakan dalam pengolahan data.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini untuk mengukur validitas digunakan *Coefficient correlation pearson* yaitu dengan menghitung korelasi antara score masing-masing butir pertanyaan dengan *total score* (Ghozali, 2005). Variabel Audit Kinerja Sektor Publik terdiri dari 8 item pertanyaan, Pengawasan Fungsional terdiri dari 8 item pertanyaan, dan Akuntabilitas publik terdiri dari 8 item pertanyaan.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS 16.0 menunjukkan nilai *correlation pearson* masing-masing instrumen yang dapat dilihat pada tabel. 4.5 ; 4.6 dan 4.7 berikut ini.

Tabel 4.5
Validitas Instrumen Audit Kinerja Sektor Publik

Variabel	Item	Nilai Pearson Correlation	Status
Audit Kinerja Sektor Publik	AKS1	0,734	Valid
	AKS2	0,498	Valid
	AKS3	0,727	Valid
	AKS4	0,632	Valid
	AKS5	0,777	Valid
	AKS6	0,525	Valid
	AKS7	0,620	Valid
	AKS8	0,909	Valid

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing *score* butir pertanyaan (AKS1 – AKS8) terhadap *total score* butir-butir pertanyaan (tindakan supervisi) menunjukkan hasil yang signifikan (pada level 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan pada variabel audit kinerja sektor

publik adalah valid. Sehingga data yang dikumpulkan dalam instrumen penelitian ini khususnya variabel audit kinerja sektor publik layak untuk dianalisa lebih lanjut.

Tabel 4.5

Validitas Instrumen Pengawasan Fungsional

Variabel	Item	Nilai <i>Pearson Correlation</i>	Status
Pengawasan Fungsional	PF1	0,729	Valid
	PF2	0,516	Valid
	PF3	0,506	Valid
	PF4	0,786	Valid
	PF5	0,887	Valid
	PF6	0,774	Valid
	PF7	0,830	Valid
	PF8	0,868	Valid

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa korelasi antara masing-masing *score* butir pertanyaan (PF1 – PF8) terhadap *total score* butir-butir pertanyaan (tindakan supervisi) menunjukkan hasil yang signifikan (pada level 0.05). Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pertanyaan pada variabel pengawasan fungsional adalah valid. Sehingga data yang dikumpulkan dalam instrumen penelitian ini khususnya variabel pengawasan fungsional layak untuk dianalisa lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

a. Multikolinearitas

Secara umum multikolinearitas jarang dijumpai pada variabel independen hal ini bisa dilihat pada lampiran hasil uji yang dapat menjelaskan bahwa data penelitian ini bebas multikolinearitas terbukti dengan nilai *tolerance* mendekati 1 dan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) dibawah 10 (Ghozali, 2005). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam penelitian ini.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	AKS	,975	1,025
	PF	,975	1,025

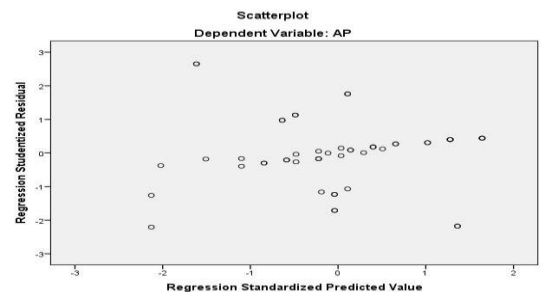
a. Dependent Variable: AP

b. Heterokedastisitas

Pendeteksian terhadap heteroskedasitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika *variance residual* yang tidak random

terhadap variabel bebas atau nilai variabel terikat atau jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedasitas. Heteroskedasitas akan memperlemah kemampuan memprediksi suatu model regresi jadi model yang baik harus terbebas dari heteroskedasitas atau dengan kata lain homokedasitas yaitu varian dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap.

Pengujian ada tidaknya heteroskedasitas dalam penelitian ini dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residualnya (*SPRED*). Dasar analisis 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedasitas 2) Jika ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Output Uji Heteroskedasitas Data (Diagram Scatterplot).



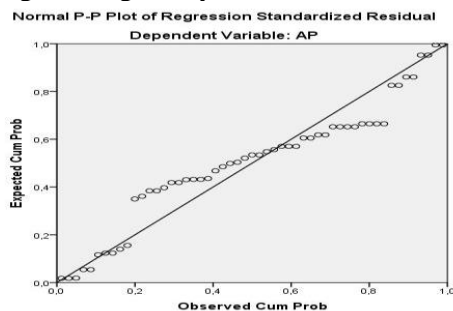
Berdasarkan grafik scatterplot antara *SRESID* dan *ZPRED* dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi dengan Y sesungguhnya) yang telah di-*standardized* yang memperlihatkan titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas, tersebar baik keatas maupun kebawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi perilaku penurunan akuntabilitas publik berdasarkan masukan kedua variabel independen (Audit Kinerja Sektor Publik dan Pengawasan Fungsional).

4.4.4. Normalitas

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk itu diperlukan uji normalitas, yang

dimaksudkan untuk menguji apakah variabel independen (terkait) dan variabel dependen (bebas) dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian distribusi normal dilakukan dengan cara melihat histogram yang membandingkan data observasi dengan distribusi yang mendekati normal.

Selain itu uji normalitas dapat juga dengan menggunakan *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Dengan memperhatikan tampilan grafik histogram dan grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang mendekati normal. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, dengan penyebaran mengikuti arah garis diagonal. Dengan memperhatikan kedua grafik tersebut dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas sehingga layak untuk digunakan.

Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel (X1-X2) Terhadap Variabel (Y1)

Keempat asumsi yang melandasi analisis *path* terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan untuk pendugaan analisis *path* persamaan pertama. Hasil analisis *path* untuk persamaan pertama dirangkum dalam Tabel 5.8. dan disajikan dalam Gambar 5.1. Hasil Analisis *Path* Persamaan sebagai berikut.

Tabel 5.7
Rangkuman Hasil Koefisien Path
Persamaan Pertama

Pengaruh Variabel	Koefisien Jalur (Beta)	t-statistik ($t_{kritis}=1,66$)	Hasil Pengujian	Koefisien Determinasi	Pengaruh Error (P_{e1})
X1 -> Y1	0,305	2,409	Signifikan	0,218	0,78,2
X2 -> Y1	0,309	2,433	Signifikan	Atau 21,8%	Atau 78,2%

				R_{square}	
X1 -> Y1	0,305	2,409	Signifikan	0,218	0,78,2
X2 -> Y1	0,309	2,433	Signifikan	Atau 21,8%	Atau 78,2%

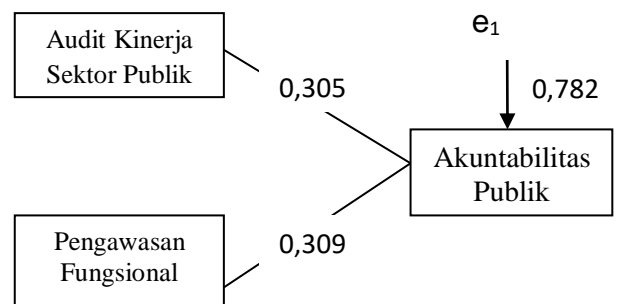
Sumber: (Lampiran 2)

Pengaruh error (P_{e1}) pada persamaan pertama ditentukan sebagai berikut:

$$P_{e1}^2 = V1 - 0,218$$

$$= 0,782 \text{ (78,2\%)}$$

Gambar 5.1
Hasil Analisis Path Persamaan Pertama



Berdasarkan pada Tabel 5.7. berikut disajikan analisis *path* dalam bentuk persamaan pertama sebagai berikut:

$$Z_{Disc} = 0,305 Z_{AKs} + 0,309 Z_{PF} + e_1$$

.....(5.1)

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa besarnya koefisien *path* (diperoleh dari koefisien beta hasil OLS) antara audit kinerja sektor publik (X1) terhadap akuntabilitas publik (Y1) sebesar 0,305 dan nilai t-statistik 2,409 > t_{kritis} 1,66 sehingga disimpulkan terdapat pengaruh positif audit kinerja sektor publik (X1) terhadap akuntabilitas publik (Y1). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti secara empiris untuk menerima hipotesis (H1). Koefisien jalur bertanda positif, artinya semakin tinggi akuntabilitas kinerja sektor publik maka semakin tinggi akuntabilitas publik (Y1).

Besarnya koefisien *path* (diperoleh dari koefisien beta hasil OLS) pengaruh pengawasan fungsional (X2) terhadap akuntabilitas publik (Y1) sebesar 0,309 dengan nilai t-statistik 2,443 > t_{kritis} 1,66. Jadi, dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif akuntabilitas kinerja sektor publik (X2) terhadap akuntabilitas publik (Y1).

Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti secara empiris untuk menerima hipotesis (H2). Artinya, semakin tinggi tingkat pengawasan fungsional maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas publik (Y1).

5.3. Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Tabel 5.8 menyajikan hasil secara lengkap tiga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel tersebut menunjukkan semua hipotesis diterima, yaitu audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Hasil analisis tersebut dapat dikomparasi pengaruh terkuat (dominan). Hasil pengujian pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel audit kinerja sektor publik.

Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil analisis *path* menunjukkan bahwa audit kinerja sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik diterima. Artinya, semakin tinggi audit kinerja sektor publik akan meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa fungsi audit kinerja sektor publik mampu menjelaskan variasi akuntabilitas publik di Kabupaten Bondowoso. Manfaat utama dilakukannya audit kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas publik. Audit kinerja memiliki peran yang lebih penting sebagai alat jaminan dalam hal akuntabilitas kepada publik. Praktek audit kinerja yaitu termasuk pengukuran kinerja, digunakan untuk menilai dan memverifikasi nilai uang dalam sebuah organisasi pemerintahan dan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Akuntabilitas Publik.

Berdasarkan hasil analisis *path* menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Artinya hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik diterima. Semakin tinggi pengawasan fungsional maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas publik.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) yang menemukan bahwa pengawasan fungsional memiliki pengaruh yang signifikan dan positif dalam mewujudkan akuntabilitas publik. Hal ini dikarenakan tujuan pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan berlangsung sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik. Jika pengawasan fungsional dilaksanakan dengan baik, maka akan tercipta akuntabilitas publik yang baik juga. Berkaitan dengan Pengawasan fungsional, Inspektorat sebagai salah satu aparat pengawas fungsional memiliki peran penting dalam melaksanakan pengawasan. Berdasarkan PP No.60 tahun 2008, inspektorat daerah melakukan pengawasan fungsional intern yaitu seluruh kegiatan audit, review, evaluasi pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pertanggungjawabannya. Jadi dengan adanya pengawasan fungsional dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya akuntabilitas publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional pada pemerintah daerah Bondowoso. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : a) Audit kinerja berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. b) Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik. c) Pengawasan fungsional memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan

dengan audit kinerja sektor publik. berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas publik.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Keterbatasan penelitian ini dapat disejajarkan sebagai berikut:

1. Terdapat 5 SKPD yang menolak mengisi kuisioner sehingga dapat mempengaruhi hasil penelitian.
2. Dari model penelitian yang digunakan, diketahui bahwa variabel penelitian yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 21,8%. Sedangkan 78,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi aparat pengawas fungsional agar dapat terus menjalankan perannya dengan baik dan optimal.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Publik seperti pengendalian eksternal, dan pengawasan yang dilakukan DPRD, Audit kinerja dan Independensi Auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2007. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 2005. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Jogjakarta: BPFE
- Halim, Abdul dan Theresia. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Halim, Abdul dan Theresia. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Hudana, Revy Septhian. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung

Husen, La Ode. 2004. *Hubungan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pengawas Keuangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: CV. Utomo.

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multilavare dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jones, Rowan and Pendle Bury. 2003. *Public Sector Accounting*. 4th Edition. London: Prentice Hall.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan 2011 atas Laporan Keuangan Daerah Kota Bondowoso Tahun Anggaran 2012.

Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik..* Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad. -. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah,. Jurnal Akuntansi pemerintah Vol 2, No.1. Jakarta.
- Narimawati, Umi. 2015. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 2009. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 222007 tentang Pedoman Tata cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Melalui (www.google.com) [09/12/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui (www.google.com) [11/11/2012]
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui (www.google.com) [06/06/2013]
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Edisi kedua.Negara.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Rahayu, Cici. 2011. Pengaruh Audit kinerja Sektor Publik dan Pengawasan fungsional terhadap Akuntabilitas Publik. Skripsi. UNIKOM. Bandung.
- Rai, I Gusti Agung. 2008. Audit Kinerja Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Sadeli, Dadang. 2008. Profesionalitas Aparat Pengawasan Fungsional Intern Terhadap Pelaksanaan Audit Pemerintahan dan Implikasinya Kepada Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah Daerah. UPI. Vol. 10, No. 2. Agustus. Hlm. 101-111.
- Supardi, Deddy. Wiarty, Sheirly. 2009. Peranan Audit Kinerja dalam Akuntabilitas. UNIKOM. Vol. I, No. 2. April. Hlm. 77-94.
- Tuanakotta,2007, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).Amerika Serikat.
- Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. Universitas Pattimura Ambon. Vol. 10, No. 1.Juni. Hlm. 66-88.
- Ulum, Ihyaul. 2009. Audit Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta : Bumi Aksara.
- Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Melalui (www.google.com) [11/11/2012]
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara. Melalui
(www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Melalui
(www.google.com) [11/11/2012]

UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi public. Melalui
(www.google.com) [11/11/2012]

Wasistiono, Sadu. 2010. Pengelolaan Keuangan
Dan aset Daerah. Bandung :
Fokusmedia.

Wilopo. 2001. “Faktor-faktor yang Menentukan
Kualitas Audit pada Sektor
Publik/Pemerintah”. Ventura. STIE Perbanas
Surabaya. Vol. 4 No. 1. Juni. pp. 27 – 32.